

BAB III

ANALISIS KONFLIK SENGKETA KASHMIR MENGGUNAKAN TEORI

DIPLOMASI KOERSIF

Diplomasi merupakan sebuah upaya yang dianggap memiliki efektivitas dan efisiensi dibandingkan dengan perang untuk menjaga kestabilan dan perdamaian dunia. Tujuan dari upaya diplomasi adalah untuk mencari jalan keluar dari sebuah konflik antara dua negara, yang mana solusi yang dicapai selama proses diplomasi mengandung kepentingan dari masing-masing negara yang berkonflik.

Diplomasi koersif digunakan dengan tujuan untuk mengubah sikap atau keputusan suatu negara melalui pemberian ancaman, sanksi, pemutusan atau pembatalan kerja sama. Dalam diplomasi koersif bentuk paksaan atau kekerasan tidak langsung diterapkan, sehingga lebih mengutamakan pemberian ultimatum terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu. Karena mengedepankan ultimatum dan ancaman, diplomasi koersif ini membawa isu menjadi abu-abu dengan tidak ada sikap “memberi” dan “mengambil”.

“Coercive diplomacy applies pressure in a manner and magnitude that seeks to persuade an opponent to cease aggression rather than bludgeon him into stopping...just enough force of an appropriate kind to demonstrate resolution and to give credibility to the threat that greater force will be used if necessary” (Jentleson, 2006)

Diplomasi koersif menggunakan strategi dengan memberikan kekuatan dan tingkatan tertentu yang bertujuan untuk mengajak lawan menghentikan agresi. Dengan memberikan tekanan secukupnya untuk menunjukkan tujuan negara yang melakukan diplomasi (disebut sebagai *coercer state*) kepada negara yang menjadi sasaran (disebut sebagai *target state*), juga menunjukkan ancaman bahwa kekuatan yang lebih besar akan digunakan bila perlu. Imbalan dan ancaman yang digunakan dalam diplomasi ini mengikuti tuntutan dari *coercer state*. Saat *target state* memenuhi tuntutan *coercer state*, imbalan atau disebut juga *carrots* dapat diberikan. Namun sebaliknya apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka ancaman atau *sticks* akan digunakan pada *target state*. Diplomasi koersif dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diinginkan apabila menggabungkan antara *carrots* dan *sticks*, maka *coercer state* harus memenuhi tiga kriteria aspek yaitu *proportionality*, *reciprocity*, dan *coercive credibility*.

“A coercer state’s ability to tip this balance in its favor rests on its meeting three key criteria: proportionality, reciprocity, and coercive credibility” (Jentleson, 2006).

3.1. Aspek *proportionality*

Aspek ini membahas mengenai hubungan antara lingkup, sifat, tujuan, serta kekuatan yang digunakan dalam upaya diplomasi koersif. *Coercer state* harus mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dan sumber daya yang harus digunakan untuk mendapatkan tujuannya. Dalam aspek ini masalah utama yang muncul adalah tentang pertarungan yang luar biasa dengan seruan untuk

perubahan rezim pada *target state*. Cukup sulit untuk memaksa perubahan dalam kebijakan negara, memaksa perubahan dalam sifat dan kondisi yang sudah menjadi bawaan target merupakan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Terlalu besar sumber daya bisa menyebabkan porsi ancaman yang besar sehingga berpotensi untuk perang. Terlalu sedikit sumber daya mengakibatkan upaya yang dilakukan bisa gagal sejak awal (Jentleson, 2006). Seperti yang dikatakan Bruce bahwa;

“We don’t see a strict linear relationship by which the limited scope of objectives always boosts the chance of success, we do see the policy change/regime change differentiation as a crucial proportionality threshold” (Jentleson, 2006)

Dalam konflik sengketa wilayah Kashmir pada tahun 2012-2018 ini dapat terlihat dengan adanya perbedaan dalam kepemimpinan kedua Perdana Menteri yang mengalami pergantian pada periode tahun penelitian. Dengan pergantian kedua Perdana Menteri tersebut memiliki kebijakan yang berbeda, sehingga membawa dinamika hubungan kedua negara menjadi semakin kompleks. Perdana Menteri Manmohan Singh datang dari partai Indian National Congress (INC), memiliki kedekatan khusus dengan Kashmir karena partai INC pernah menduduki kursi kepemimpinan di Kashmir. Sehingga hubungan Kashmir dengan pemerintah India terjaga dengan baik, meskipun terjadi berbagai perselisihan namun hubungan India dan Pakistan cukup terjaga dengan baik. Sedangkan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang datang BJP Hindu-nasionalis, cenderung lebih keras dan kurang pro dengan masyarakat Kashmir. Eskalasi konflik Kashmir sering

memuncak, hubungan India dan Pakistan juga tidak dalam kondisi yang lebih baik lagi. India banyak melakukan uji coba nuklir dan memperkuat militernya di Kashmir.

Dengan memiliki kekuatan yang lebih besar dan semakin meningkat dari negara lain akan membuat negara lebih percaya diri untuk bertahan dan bersaing. Nuklir menjadi salah satu bentuk pertahanan India dan Pakistan, sekaligus menjadi penyeimbang kekuatan kedua negara. Demi mencapai ambisinya untuk menguasai wilayah Kashmir, India pertama kali melakukan uji coba nuklir dengan nama “*Smiling Buddha*” pada 18 Mei 1974 di Pokhran (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, 1974). Sejak saat itu, India berhasil mengembangkan nuklir dan selalu melakukan uji coba untuk menunjukkan kekuatannya pada dunia.

Pada tahun 2012 India melakukan uji coba nuklir terbaru dan terbesarnya yaitu Agni V, rudal tersebut merupakan nuklir terbesar di India. Pertama kali India melakukan uji coba nuklir jarak pendek atau menengah Agni I pada Mei 1989, setelah itu rudal Agni berkembang sampai ke series V. Rudal Agni V ini disebut sebagai *Intercontinental Ballistic Missiles* (ICBMs) karena kekuatan hulu ledaknya bisa mencapai seluruh wilayah Asia, serta sebagian wilayah Afrika dan Eropa. Berbeda dengan series rudal Agni I – IV yang memiliki kemampuan jarak pendek atau menengah dengan jarak ledak antara 1.000 km – 4.000 km, untuk Agni V memiliki jarak ledak 5.500 km – 5.800 km. Terhitung 7 kali rudal Agni V di uji coba sejak 19 April 2012 dan terakhir pada 10 Desember 2018 (India Today, 2018).

Satu pekan kemudian pada tanggal 25 April 2012, Pakistan melakukan uji coba nuklir terbesarnya yaitu Hatf IV (Shaheen-1A). Rudal tersebut merupakan

senjata nuklir yang terbaru dan terbesar yang dimiliki Pakistan, namun kekuatannya hanya jarak menengah dengan maksimal 2.500 – 3.000 km dan mencakup keseluruhan wilayah India. Pakistan lebih sering melakukan uji coba nuklir daripada India, meskipun hanya rudal kecil namun sangat terlihat bahwa Pakistan ingin menggertak negara – negara yang berkonflik dengan Pakistan khususnya India (Global Security, 2016).

India dan Pakistan merupakan negara yang tidak menandatangani *Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty* (CTBT), sehingga keduanya selalu melakukan uji coba nuklir sebagai bentuk unjuk kekuatan nuklir mereka. India memiliki alasan untuk tidak menandatangani CTBT karena berbagai alasan; pertama, nuklir dianggap sebagai teknologi unggulan, sehingga bagi negara yang sudah memiliki nuklir mereka akan meningkatkan kekuatannya melalui uji coba lapangan dan simulasi laboratorium (Neog, 2016).

Kedua, untuk menghadapi kondisi bahaya yang tidak pasti dari Pakistan dan China, sehingga India akan terus meningkatkan kekuatan nuklirnya untuk mempertahankan *power* di kawasan (Neog, 2016).

Ketiga, dari birokrasi ilmiah dan keamanan India berpendapat jika menandatangani CTBT hanya akan menghambat kemajuan India, sehingga secara tegas India tidak akan menandatangani perjanjian yang dianggapnya *unequal treaty* (Neog, 2016).

Berikut merupakan data nuklir India berdasarkan laporan dari *Center for Strategic & International Studies*.



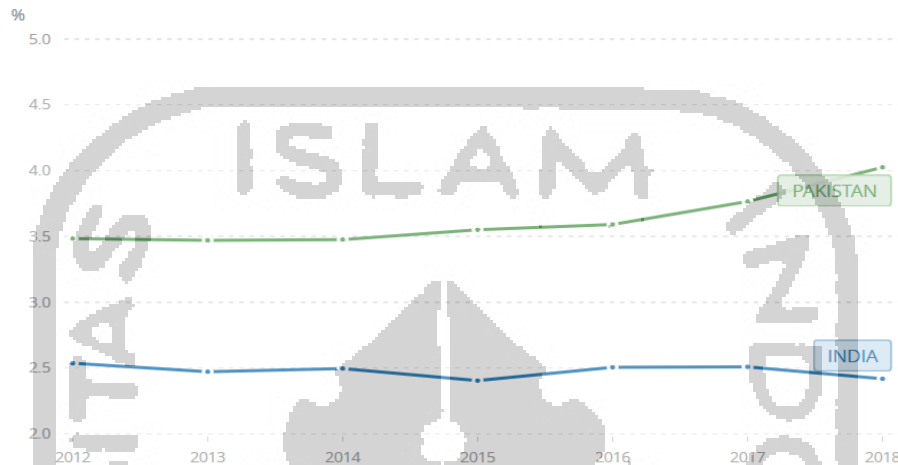
1. Prahaar. Nuklir dengan biaya terendah dan terhemat, serta memiliki hulu ledak sekitar 150 kilometer. Dengan kemampuan jangka ledaknya sampai pada Pakistan, terakhir kali diuji coba pada 20 September 2018 (Muhaimin, 2018)
2. Brahmos (*Cruise Missile*). Diproduksi dengan kerja sama India-Rusia, yang memiliki hulu ledak sekita 290 kilometer. Pertama kali diuji coba pada 25 Juni 2016 dan dapat ditembakkan dari darat, laut dan bawah laut (Berlianto, 2019).
3. Rudal Prithvi I. Nuklir pertama yang dikembangkan dalam program “India’s nuclear deterrence” dengan hulu ledak sekitar 250 kilometer. Dengan ukuran yang kecil (panjang Sembilan meter dan diameter satu meter) membuatnya sulit

dikenali dalam satelit. Senjata ini telah dilakukan uji coba 3 kali pada tahun 2016 (Kristensen & Norris, 2017).

4. Rudal Agni 1. Mulai beroperasi pada 2007, dengan hulu ledak sekitar 700 kilometer. Pembuatan nuklir ini difokuskan untuk Pakistan sebagai target dan telah dilakukan uji coba 2 kali pada tahun 2016 (Kristensen & Norris, 2017).
5. Nurbhay (*Cruise Misile*). Mei 2013 pertama kali beroperasi namun mengalami kendala teknis dan berhasil uji coba pada 17 Oktober 2014. Dengan hulu ledak sekitar 1.000 kilometer dan dapat ditembakkan di darat, laut dan bawah laut (Muhaimin, 2014).
6. Rudal Agni 2. Memiliki hulu ledak lebih dari 2.000 kilometer dengan fokus penargetan pada Tiongkok bagian barat, tengah dan selatan. Nuklir series ini kemungkinan mengalami kendala teknis karena hanya satu kali tes pada 4 Mei 2017 dan dilaporkan gagal (Kristensen & Norris, 2017).
7. Rudal Agni 3. Dengan hulu ledak lebih dari 3.2000 kilometer bisa menjangkau Pakistan dan Tiongkok sekaligus, telah diuji coba 4 kali dan terakhir kali pada 27 April 2017 dari pulau Abdul Kalam, pantai timur India (Kristensen & Norris, 2017).
8. Rudal Agni 4. Dengan hulu ledak antara 3.500 – 4.000 kilometer dan bisa menjangkau keseluruhan wilayah Tiongkok. Uji coba pertama pada tahun 2014 dan yang kedua pada 2 Januari 2017 (Kristensen & Norris, 2017).
9. Rudal Agni 5. Nuklir terbesar yang dimiliki India dengan hulu ledak lebih dari 5.000 kilometer dan menjangkau seluruh wilayah Asia, serta sebagian wilayah

Eropa dan Afrika. Series ini sudah diuji coba 7 kali sejak 19 April 2012 dan terakhir pada 10 Desember 2018 (Kristensen & Norris, 2017).

Grafik pengeluaran militer India dan Pakistan tahun 2012-2018



Sumber: (The World Bank, 2019)

Selain nuklir, India juga membangun pertahanannya, karena militer merupakan salah satu elemen terpenting dalam pertahanan setiap negara terlepas dari negara tersebut berkonflik atau tidak. Dalam data diatas dapat dilihat bahwa tidak ada kenaikan yang tinggi dalam pembangunan militer India. Berbeda dengan Pakistan yang memiliki tingkat pembangunan militer yang tinggi untuk menyeimbangkan kekuatan dengan India.

Data pembelian helikopter militer oleh Indian Air Force (IAF) tahun 2012.

Heavy lift helicopters	15	CH-47 Chinook
Medium attack helicopters	22	AH-64 Apache
Utility twin-engine helicopters	159	HAL (Dhruv Mk III)
Naval twin-engine helicopters	50	Global market
Naval medium, multi-role	91	Global market
Weaponised utility helicopter	76	HAL (Rudra)
Light Combat Helicopter	179	HAL (LCH)
Light Utility Helicopters	197	Global market
Light Utility Helicopters	187	HAL

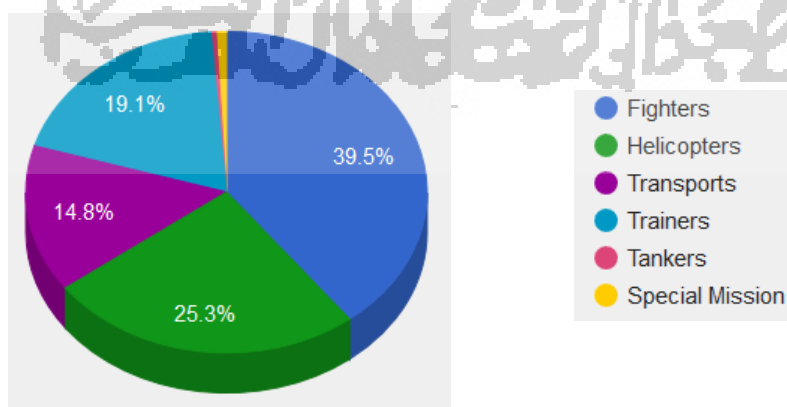
Sumber: Hindustan Aeronautics Ltd (HAL)

Pada tahun 2012 pemerintah India membeli helikopter militer secara besar-besaran. Sesuai dengan data diatas pembelian helikopter militer oleh IAF terbagi dalam 10 jenis. Pertama, 139 unit helikopter Mi-17 V-5 *medium lift* Rusia dengan alokasi dana sekitar 2,4 miliar US dolar dan dapat mengangkut kurang lebih 26 tentara serta perlengkapan perang. Kedua, 15 unit helikopter kelas berat amerika CH-47 Chinook yang dibuat oleh Boeing dan telah digunakan Amerika di berbagai macam pertempuran seperti di Irak dan Afghanistan, serta daya angkut 50 tentara lengkap dengan alat tempur sebsar 12,7 ton. Ketiga, 22 unit helikopter medium AH-64 Apache buatan Boeing, dengan daya serang yang kuat didukung dengan meriam, roket & rudal anti tank sehingga mampu memenangkan pertempuaran. Keempat, 159

unit helikopter utilitas Dhruv Amrk III yang dibuat oleh Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) dan alat ini dibutuhkan untuk seluruh militer India seperti Angkatan Darat, Angkatan Udara, penjaga pantai. Kelima, 50 helikopter ringan bermesin ganda dari Agusta Westland, sebagai cadangan apabila helikopter Dhruv mengalami kendala ketika digunakan. Keenam, 91 unit helikopter multifungsi dari tender global untuk menggantikan helikopter vintage sea king, yang terbang dari kapal frigate besar dan kapal perusak. Ketujuh, 76 unit helikopter Dhruv yang merupakan versi senjata berat dilengkapi peralatan elektronik perang yang lengkap termasuk meriam, roket pods, serta rudal anti tank. Kedelapan, 179 helikopter tempur ringan yang diproduksi oleh HAL yang beratnya 5,5 ton dengan kemampuan lepas landas 10.000 kaki, senjata roket hingga 16.300 kaki dan rudal terbang di atas 21.000 kaki. Kesembilan, 197 helikopter ringan dari tender global. Kesepuluh, 187 helikopter ringan yang diproduksi oleh HAL (Syah, 2012).

Militer India merupakan terkuat nomor dua di Asia dan nomor empat di dunia. Dengan personel mencapai 3.462.500 yang terdiri dari 1,36 juta personel aktif dan 2,1 juta personel cadangan (India Military Strength, 2019). Terbagi sebagai berikut:

- Angkatan Udara



“Total Aircraft Strength, 1.666 (ranked 4 of 137). Fighters 658 (ranked 4 of 137). Transport 247 (ranked 3 of 137). Trainers 318 (ranked 6 of 137). Helicopters Strength 422 (ranked 5 of 137). Tankers 7. Special Mission 14” (Indian Air Force, 2020).

- Angkatan Darat

“Combat Tanks, 4.148 (ranked 6 of 137). Armored Fighting Vehicles, 2.815 (ranked 25 of 137). Self-Propelled Artillery, 200 (ranked 26 of 137). Towed Artillery, 4.060 (ranked 4 of 137). Rocket Projectors, 266 (ranked 14 of 137)” (India Military Strength, 2019).

- Angkatan Laut

“295 total Naval Assets. 1 Aircraft Carriers. 13 Frigates. 11 Destroyers. 22 Corvettes. 16 Submarines. 139 Patrol Vessels. 1 Mine Warfare.” (India Military Strength, 2019)

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa intensitas nuklir dari tahun 2012-2018 sangat tinggi. Dengan perubahan dinamika politik domestik dan internasional mendorong India untuk terus memperkuat dirinya menjadi semakin *powerful*.

3.2. Aspek reciprocity

“Reciprocity involves an explicit or at least mutually tacit understanding of linkage between the coercer’s carrots and the target’s concessions. At every key step, both sides must believe they are getting “something for something” rather than “nothing for something” (Jentleson, 2006).

Dalam aspek ini *coercer state* harus bisa meyakinkan *target state* bahwa ketika kepentingan mereka terpenuhi maka akan diberikan *carrots* sebagai imbalan untuk *target state*. Upaya ini biasanya dilakukan oleh *coercer state* secara bertahap atau secara langsung dengan cukup kuat dan jelas tentang apa yang diinginkan dari pihak target sehingga target akan berpikir bahwa hal tersebut menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Namun hal sebaliknya akan terjadi apabila pihak target tidak yakin bahwa upaya tersebut dapat menguntungkan mereka, bisa jadi akan menjadi sangat merugikan dan meminta pengembalian konsesi. Sehingga pada intinya kepercayaan harus dibangun dengan kuat agar mampu meyakinkan pihak target dan *carrots* menjadi salah satu elemen penting untuk dipertimbangkan pihak target (Jentleson, 2006).

Konflik Kashmir berawal dari konflik politik kekuasaan antara penguasa Kashmir dan pemerintah India, sehingga sangat penting peran politik untuk menyelesaikan masalah Kashmir. Perasaan benci, salah paham, dan ketidakpercayaan semakin dipupuk setiap hari, baik masyarakat ataupun pemerintah India dan Pakistan. Masyarakat Kashmir hanya ingin mendapatkan kebutuhan dasar yang menjadi hak dan kewajiban hidupnya seperti keadilan & kesetaraan dalam beribadah, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Mereka berdemonstrasi untuk menyuarkan ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, serta menuntut resolusi yang telah dijanjikan oleh Mahatma Gandhi untuk memberikan kebebasan Kashmir dalam menentukan nasibnya sendiri. Namun sayangnya konflik menjadi kompleks dan terlihat seolah masyarakat Kashmir melawan pemerintah India, sehingga

pemerintah India selalu meningkatkan jumlah militernya dan tidak terhitung dalam melanggar garis LoC sejak 1989 hingga kini (Tabassum, 2012).

Perdana Menteri India pertama, Mahatma Gandhi memberikan kebijakan berupa otonomi khusus kepada Negara Bagian India. Tertuang dalam *article 370* yang berjudul “*Temporary, Transitional, and Special Provisions*”, yang digunakan sebagai dasar kebijakan untuk membentuk pemerintahan sendiri dan *privilege* wilayah Kashmir. Hak istimewa yang diatur dalam *article 370* ada 94 item diantaranya seperti; otonomi wilayah, konstitusi, kepemilikan properti, kewarganegaraan, hak-hak dasar, dan lain sebagainya. Kecuali urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi tetap menjadi wewenang pemerintah India (Mustafa, 2019).

Diakhir kepemimpinan Perdana Menteri Manmohan Sigh kondisi hubungan India dan Pakistan kembali terjalin dengan baik. Perdana Menteri Manmohan Sigh dan Perdana Menteri Nawaz Sharif bertemu di New York dalam acara United Nations General Assembly tahun 2013. Keduanya sepakat untuk menghentikan segala serangan yang terjadi dan menjaga kondisi perdamaian kedua negara dengan kerja sama dan penguatan batas *Line of Control*. Setelah Manmohan Sigh berakhir jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Narendra Modi, situasi kedua negara berubah termasuk konflik Kashmir yang berkepanjangan.

Pada tahun 2002 terjadi kerusuhan anti muslim di Gujarat dengan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Ketika itu Narendra Modi sebagai gubernurnya dan negara-negara barat banyak memboikot aksi tersebut. Ketika pemilu 2014

Narendra Modi yang berasal dari BJP partai Hindu nasionalis menang telak sebagai Perdana Menteri India.

Narendra Modi merupakan orang yang terkenal tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. Pada tahun 2014 setelah Narendra Modi terpilih menjadi Perdana Menteri dan memberikan sambutan kepada masyarakat Kashmir bahwa;

“My message to the people of Jammu and Kashmir is that the government wants to carry forward former prime minister Atal Bihari Vajpayee’s plan in the state. My aim is to win the hearts of the people of the state. Democracy (Jamhuriyat), humanity (Insaniyat) and Kashmiriyat, these words of Atal ji have made special place in the hearts of Kashmiris and have ignited a hope in every Kashmiri youth about better future” (Bukhari, 2015).

Pada tahun 2018 BJP yang merupakan partai politik terbesar di India yang memutuskan aliansi dengan PDP yang sebelumnya berkoalisi sejak 2016. Dengan putusannya aliansi kedua partai tersebut, PDP kehilangan kendalinya di Kashmir dan BJP mendesak pemerintah Kashmir untuk mengembalikan kuasa atas wilayah Kashmir kepada pemerintah India karena tidak mampu membangun Kashmir menjadi lebih baik. Perwakilan dari BJP menyampaikan bahwa:

“Basically, keeping in mind the larger national interest of India’s integrity and security, in order to bring control over the situation prevailing in the state, we have decided that it is time the reins of power be handed over to the state governor” (Miglani, 2018)

Geopolitik yang dinamis dan fluktuatif, tergantung pada kepentingan para aktor. Setelah BJP menarik aliansi dari PDP dan mendesak Gubernur Kashmir Mehbooba Mufti untuk mengundurkan diri, seketika kondisi Kashmir menjadi kacau termasuk hubungan India dan Pakistan yang memuncak. Pada intinya memang India tidak akan pernah melepaskan Kashmir sebagai bagian dari wilayahnya dan akan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankannya.

Janji yang dikatakan Perdana Menteri Narendra Modi untuk menegakkan demokrasi dan kemanusiaan di Kashmir belum terlihat pembuktiannya. Dibawah kepemimpinan Narendra Modi dalam konflik Kashmir banyak menggunakan upaya *hard power* dan konflik semakin kompleks. Seperti KTT SAARC tahun 2016 dibatalkan karena hubungan India dan Pakistan memanas, BJP menarik aliansi dari PDP yang sebelumnya beraliansi sejak 2014, dan berakhir pada pengunduran diri *Chief Minister of Jammu and Kashmir* Mehbooba Mufti sehingga pemerintah India mengambil alih kekuasaan Kashmir.

Kerja sama pertandingan olahraga kriket yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, sebagai salah satu upaya untuk menjalin hubungan baik antara India dan Pakistan. Kedua negara tersebut selalu terlihat jelas bersaing dalam pertandingan, sehingga seolah terlihat seperti perang tanpa baku tembak. Banyak pihak yang mengharapkan dengan adanya kerja sama dari olahraga ini dapat membawa dampak positif untuk perdamaian kedua negara, sehingga kedua negara akan menaruh rasa saling percaya dan terjalin diplomasi serta kerja sama di berbagai bidang lainnya (Pasricha, 2012).

3.3. Aspek *coercive credibility*

“Coercive credibility means that in addition to the running calculations comparing the costs and benefits of cooperation, the target knows that a definitive refusal to cooperate would have serious consequences” (Jentleson, 2006).

Aspek ini membentuk elemen intimidasi *coercer state* kepada *target state*, karena apabila terjadi penolakan maka akan memiliki konsekuensi yang serius. Sehingga elemen intimidasi dibentuk dengan menempatkan posisi pihak target tidak memiliki pilihan lain selain menjalin kerja sama dengan *coercer state* meskipun telah menghitung kalkulasi untung ruginya (Jentleson, 2006).

Perdana Menteri Narendra Modi membatalkan sebagian besar pertemuan bilateral kedua negara, baik melalui KTT SAARC ataupun UN. Pada awal periode Perdana Menteri Narendra Modi mengundang Presiden Pakistan ke India untuk menjalin hubungan baik secara bilateral, namun India mendadak membatalkan pertemuan tersebut karena hubungan keduanya memuncak atas perselisihan konflik Kashmir (BBC News, 2014).

Pada tahun 2016 terjadi baku tembak di LoC antara tentara India dan Pakistan. India mengancam Pakistan bahwa

“We need to cripple them, we need to bring them down on their knees. Pakistan is one-fifth the size of India. If we fire even a part of our arsenal, most of it will be on the Pakistani Punjab, from

where the Pakistani army comes: Not a crop will grow there for 800 years! Lets stop self-dettering ourselves” (Mian, 2016).

India selalu merespon dengan cepat setiap saat terjadi perselisihan dengan Pakistan, baik secara militer, nuklir, maupun memutuskan kerja sama. Pada kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi KTT SAARC selalu tertunda dikarena hubungan India dan Pakistan yang tidak dalam kondisi yang baik, selain itu uji coba nuklir telah dilakukan berkali-kali sebagai upaya unjuk kekuatan India terhadap musuhnya.

Sungai Indus yang mengalir ke India dan Pakistan melalui Kshmir juga menjadi salah satu pelengkap yang dipersengketakan. Ketika September 2016 India mengumumkan akan mempercepat pembangunan bendungan, hal ini tentu akan menghambat perairan sungan di Pakistan. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa *“blood and water cannot flow together”*, lalu direspon oleh Pakistan bahwa, pencabutan perjanjian dapat dianggap sebagai *“act of war”* (Mian, 2016).